

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kepemilikan Manajerial

2.1.1.1 Pengertian Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Kepemilikan Manajerial sangat penting bagi perusahaan karena manajer ikut ambil bagian dalam kepemilikan saham di perusahaannya, dan manajer akan berusaha semaksimal mungkin dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaannya sehingga ia pun akan menikmati sebagian keuntungan dari bagiannya tersebut. Semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajerial, maka pihak manajerial akan lebih proaktif dalam bekerja mewujudkan kepentingan pemegang saham dan akhirnya akan meningkatkan kepercayaan, kemudian kinerja keuangan perusahaan juga akan naik. Pengertian Kepemilikan Manajerial menurut Hanafi (2014:75) menjelaskan dalam bukunya bahwa Kepemilikan Manajerial adalah:

“Besarnya kepemilikan saham oleh pihak manajemen atau dengan kata lain manajer juga sebagai pemegang saham, yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan dan ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan

yang diambil serta menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.”

Menurut Muh Arief Effendi (2016:16) dalam bukunya juga berpendapat bahwa:

“Kepemilikan Manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan.”

Sedangkan menurut Sonya Majid (2016) mengungkapkan Kepemilikan Manajerial adalah:

“Pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris.”

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepemilikan Manajerial adalah besarnya kepemilikan saham yang dipegang oleh manajemen perusahaan dan aktif ikut ambil andil dalam pengambilan keputusan sebagai pemegang saham.

2.1.1.2 Fungsi dan Level Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham oleh manajemen berfungsi mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham dimana maksud dari pensejajaran kedudukan ini bertujuan untuk menyamakan kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham, sehingga masalah keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer

juga sebagai pemilik perusahaan. Pernyataan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham bertujuan menjaga perilaku manajemen agar tidak melenceng dari tugasnya dalam menjalankan aktivitas perusahaan dengan cara mengubah pola pikir manajemen menjadi sama dengan pola pikir pemegang saham yaitu meningkatkan kinerja perusahaan untuk meningkatkan keuntungan demi mencapai kesejahteraan yang maksimal (Negar Witanto Herman, 2016).

Berikut ini adalah level Kepemilikan Manajerial dalam perusahaan menurut Yuli Soesetio 2007 dalam Negar Witanto Herman (2016):

1) *Low Levels of Managerial Ownership (0%-5%)*

Untuk *low level of managerial ownership*, disiplin eksternal, pengendalian internal dan insentif masih didominasi oleh tingkah laku manajemen. Manajemen dalam level ini apabila kinerja mereka baik lebih cenderung lebih memilih paket kompensasi seperti opsi saham dan *stock grants* daripada menambah jumlah kepemilikan saham diperusahaan sendiri

2) *Intermedicate Levels of Managerial Ownership (5%-25%)*

Di level ini, manajer mulai menunjukkan perilaku sebagai pemegang saham. Dengan bertambahnya kepemilikan maka semakin besar jumlah hak suara mereka. Jika *low levels of managerial ownership* lebih memilih rencana kompensasinya sedangkan *intermedicate levels of managerial ownership* lebih memilih mengambil kendali perusahaan.

3) *High levels of Manajerial Ownership (40%-50%)*

Di level ini, manajer tidak memiliki otoritas penuh terhadap perusahaan dan disiplin eksternal tetap berlaku.

4) *High Levels of Managerial Ownership (greater than 50%)*

Di level ini, manajer memiliki wewenang penuh terhadap perusahaan. Dengan kepemilikan diatas 50% adanya tekanan dari disiplin eksternal (*outside shareholders*) hampir tidak ada sehingga mengakibatkan menurunnya nilai perusahaan.

5) *Very High Levels of Manajerial Ownership*

Di level ini perusahaan dimiliki oleh pemilik tunggal.

2.1.1.3 Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Secara sistematis, Muh Arief Effendi (2016:17) mengemukakan indikator yang digunakan untuk mengukur Kepemilikan Manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen terhadap seluruh jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan.

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham Pihak Manajemen}}{\text{Seluruh Jumlah Saham Perusahaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

KM	= Kepemilikan Manajerial
Jumlah Saham Pihak Manajemen	= Jumlah lembar saham biasa yang dimiliki oleh dewan direksi.
Seluruh Jumlah Saham Perusahaan	= Jumlah lembar saham yang dikeluarkan oleh perusahaan

2.1.2 Komisaris Independen

2.1.2.1 Pengertian Komisaris Independen

Pengertian Komisaris Independen menurut Muh Arief Effendi (2016:42) dalam bukunya mengemukakan bahwa Komisaris Independen adalah:

“Komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Komisaris Independen menunjukkan bahwa keberadaan mereka sebagai wakil pemegang saham independen (minoritas) termasuk mewakili kepentingan lainnya misalnya investor.”

Menurut Sam'ani 2008 dalam Ulimaz Talitha Rahma (2016) Komisaris Independen adalah:

“Komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak memiliki kepentingan (independen) dari para *stakeholder* perusahaan. Komisaris yang berasal dari luar perusahaan cenderung akan bertindak lebih independen, sehingga dapat memonitor dan mengontrol manajemen.”

Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2010:13), Komisaris Independen adalah:

“Anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.”

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Komisaris Independen adalah Komisaris yang berasal dari luar perusahaan, Komisaris Independen cenderung akan bertindak lebih independen dan menunjukkan keberadaan mereka sebagai wakil pemegang saham minoritas sehingga dapat memonitor dan mengontrol manajemen.

2.1.2.2 Kedudukan dan Peran Komisaris Independen

Pada dasarnya semua Komisaris Independen bersifat independen, mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan. Dengan adanya kehadiran Komisaris Independen juga berpengaruh terhadap meningkatnya kapabilitas Dewan Komisaris secara keseluruhan sehingga efektivitas kerja mereka dapat menjadi lebih optimal. Keberadaan Komisaris Independen diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas dewan Komisaris secara signifikan, terutama dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan *system* kendali internal, manajemen risiko, pengungkapan laporan keuangan perusahaan serta praktik-praktik *Good Corporate Governance* secara keseluruhan.

Dengan adanya peran Komisaris Independen melihat adanya potensi penyimpangan, Komisaris Independen segera mengambil langkah-langkah

pengecahan atau perbaikan, tentu saja tetap dalam kerangka komisaris. Dengan dijalankan peran tersebut, maka Komisaris Independen telah berfungsi efektif dalam melindungi perusahaan dari risiko sekaligus melindungi Komisaris dari potensi tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya (Indra Surya, 2015:80).

2.1.2.3 Pengukuran Komisaris Independen

Keberadaan Komisaris Independen di Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor : KEP-315/bej/06-2000 perihal Peraturan No I-A, tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan tercatat pada butir mengenai tentang Komisaris Independen. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik, menyebutkan tentang rasio Komisaris Independen yaitu perusahaan yang tercatat di BEI wajib memiliki Komisaris Independen yang jumlah sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris. Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan (KNKG, 2010:13).

Secara sistematis, Muh Arief Effendi (2016:45) dalam bukunya mengemukakan rumus Komisaris Independen sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Semua Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

2.1.3 Kinerja Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Kinerja

Pengertian Kinerja menurut Bastian (2016:239) dalam bukunya menjelaskan bahwa kinerja adalah :

“Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*staregic planning*) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu”

Menurut Mahsun (2014:25) dalam bukunya menjelaskan bahwa Kinerja adalah :

“Hal kerja atau prestasi kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi , sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika”

Sedangkan menurut Mangkunegara (2015:9) menjelaskan dalam bukunya bahwa Kinerja adalah:

“Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi kerja yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

2.1.3.2 Pengertian Kinerja Keuangan

Pengertian Kinerja Keuangan menurut Irham Fahmi (2016:2) dalam bukunya mengemukakan bahwa Kinerja Keuangan adalah:

“Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan secara baik dan benar”

Menurut Kurniasari (2014:12) dalam bukunya mengungkapkan bahwa Kinerja Keuangan adalah:

“Prestasi kerja di bidang keuangan yang telah dicapai oleh perusahaan dan tertuang pada laporan keuangan dari perusahaan. Kinerja Keuangan suatu perusahaan dapat dinilai dengan menggunakan alat analisis.”

Sedangkan menurut Moeheriono (2014:15) dalam bukunya menyebutkan pengertian Kinerja keuangan adalah:

“Menerapkan gambaran mengenai kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.”

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan yang tertuang pada laporan

keuangan perusahaan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan tujuan perusahaan tersebut.

2.1.3.3 Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan sendiri bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan penting mengenai *asset* yang digunakan dan untuk memacu para manajer untuk membuat keputusan yang menyalurkan kepentingan perusahaan, selain itu juga untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas usaha (Irham Fahmi, 2016:66).

Untuk melihat kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan dapat digunakan rasio yang terdapat pada pos-pos laporan keuangan. Rasio keuangan atau *financial ratio* ini sangat penting gunanya untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan. Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kondisi kinerja keuangan perusahaan karena dengan cara ini bisa mendapat perbandingan yang mungkin akan berguna dari pada berbagai angka mentahnya sendiri. Analisis rasio dapat menjelaskan pengaruh antara variable-variabel yang bersangkutan dan dipakai sebagai dasar untuk menilai kondisi tertentu (James C Van Horne, 2014:234).

Rasio keuangan yang sering digunakan dalam perusahaan menurut Irham Fahmi (2016:59) adalah:

- 1) Rasio Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu.

- 2) Rasio Leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang.
- 3) Rasio Aktivitas adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya guna menunjang aktivitas perusahaan.
- 4) Rasio Profitabilitas adalah rasio yang mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan, pengembalian asset, modal, maupun investasi.
- 5) Rasio Nilai Pasar adalah rasio yang menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar.

Dalam penelitian ini digunakan jenis rasio profitabilitas *Return On Asset* (ROA) sebagai indikator kinerja keuangan perusahaan, rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan asset yang ada untuk menghasilkan tingkat pengembalian atau pendapatan.

2.1.3.3.1 Return On Asset (ROA)

Menurut Irham Fahmi (2016:137) dalam bukunya menjelaskan pengertian *Return On Asset (ROA)* yaitu:

“Rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan”

Menurut Sudana (2015:21) dalam bukunya menjelaskan pengertian *Retrun On*

Asset (ROA) adalah:

“Kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektifitas dan efesiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan.”

Menurut Rival Veithzal (2013:123) dalam bukunya menjelaskan bahwa *Return*

On Asset (ROA) adalah:

“Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan usaha suatu perusahaan dalam memperoleh keuntuangan keseluruhan.”

Sedangkan menurut Sri Dewi Anggadini (2010) menyimpulkan bahwa *Retrun*

On Asset (ROA) adalah:

“Rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengembalian dan efesiensi pengelolaan dari asset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.”

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa *Return On Asset (ROA)* adalah rasio yang digunakan sebagai alat pengukuran untuk melihat sejauh mana kemampuan usaha suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan.

2.1.3.3.1.1 Pengukuran Return On Asset (ROA)

Secara sistematis, Irham Fahmi (2016;137) dalam bukunya mengemukakan rumus *Return On Asset (ROA)* sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

Keterangan:

Laba Bersih Setelah Pajak

= Laba bersih pada tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

Total Asset

=Jumlah total asset yang digunakan pada tahun berjalan

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial, maka manajemen akan lebih berusaha untuk memaksimalkan kinerjanya karena merasa bertanggung jawab dan memiliki perusahaan itu sendiri. Manajemen sendiri akan dapat merasakan keuntungan dari keputusan yang diambil dan juga adanya kerugian atas keputusan yang salah, sehingga diharapkan kinerja keuangan akan lebih baik karena keputusan-keputusan yang diambil akan lebih hati-hati dan akurat.

Kepemilikan Manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dan manajer, semakin meningkatnya proporsi Kepemilikan

Manajerial maka semakin baik Kinerja Keuangan sebuah perusahaan. Pada perusahaan dengan Kepemilikan Manajerial, manajer yang sekaligus pemegang saham tentunya akan menyelaraskan kepentingan sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang saham.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Fitriatun (2018) yang mengukur Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Serta penelitian yang dilakukan Hermiyetti (2016) menyimpulkan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan perusahaan. Kepemilikan Manajerial cukup efektif dalam pengambilan keputusan perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian Waskito (2014) menyimpulkan bahwa Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap Kinerja keuangan, pada perusahaan dengan kepemilikan manajerial manajer yang sekaligus pemegang saham tentunya akan menyelaraskan kepentingan sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang saham.

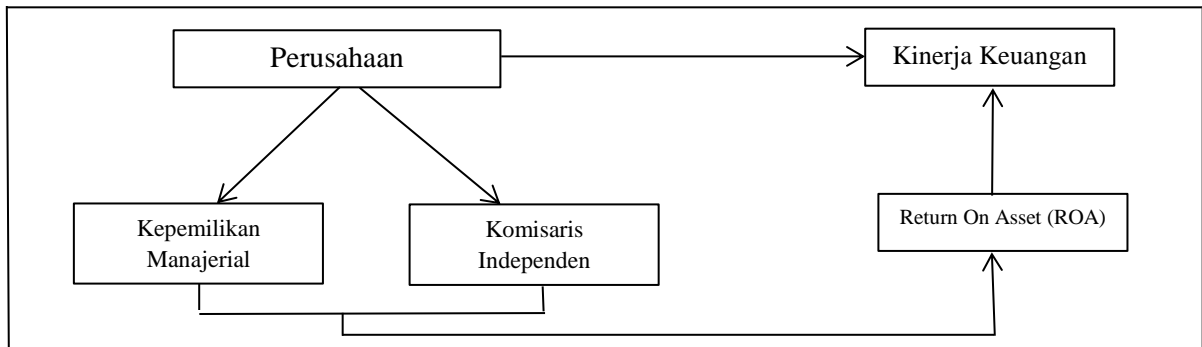
Maka dari itu jika manajemen memiliki kepemilikan dalam suatu perusahaan manajemen akan memiliki kepentingan yang sama dengan kepentingan pemilik perusahaan. Konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen dapat dihindarkan. Dengan berkurangnya konflik kepentingan maka akan terjalin kesinambungan dalam perusahaan dalam memberikan kontribusi kepada tercapainya tujuan perusahaan yaitu kinerja keuangan yang baik.

2.2.2 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014 menyatakan bahwa salah satu tugas dari Komisaris Independen yaitu dapat melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalanya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dan memberi nasihat kepada direksi. Sehingga semakin besar jumlah Komisaris Independen, maka pengawasan terhadap manajemen perusahaan akan semakin baik sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dengan adanya Komisaris Independen diharapkan dapat memberikan fungsi pengawasan terhadap perusahaan secara objektif dan independen, menjamin pengelolaan yang bersih dan sehatnya operasi perusahaan yang mendukung kinerja keuangan perusahaan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

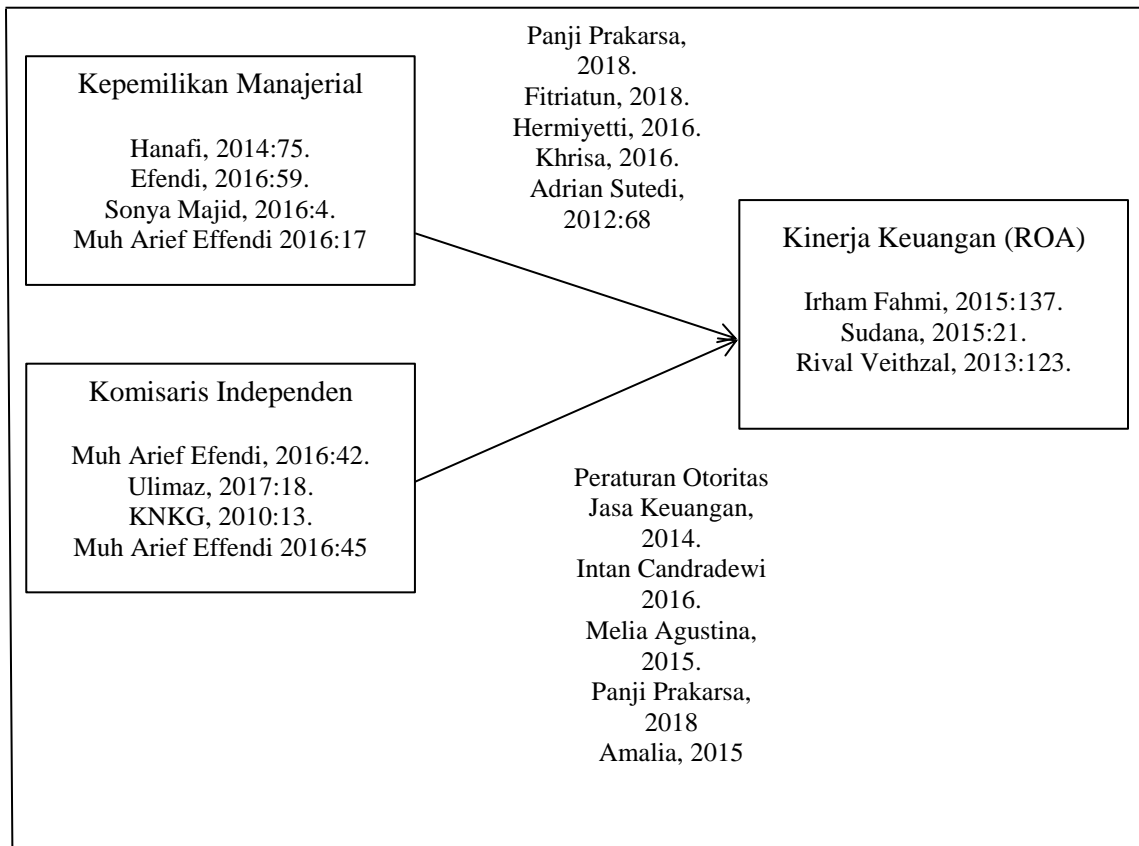
Keberadaan Komisaris Independen pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi integritas suatu laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Karena di dalam perusahaan terdapat badan yang memonitoring secara langsung dan melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen perusahaan. Dikarenakan fungsi dari Komisaris independen itu sendiri yang menjalankan tugasnya sebagai pengawas independen yang mampu meningkatkan kinerja keuangan di suatu perusahaan, dengan begitu semakin besar jumlah komisaris independen maka pengawasan akan semakin baik dengan begitu meningkatkan kinerja keuangan di suatu perusahaan

Teori ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Intan Candradewi (2016) Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan yang di proxykan dengan proporsi *Return On Asset*, semakin besar Komisaris Independen maka *Return On Asset* yang dihasilkan semakin besar karena semakin tinggi proporsi Komisaris Independen, maka semakin baik pula fungsi pengawasan dalam perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Melia (2015) yang menunjukkan bahwa Komisaris independen berpengaruh positif terhadap Kinerja keuangan yang diproxykan dengan proporsi *Return On Asset*, semakin besar Komisaris Independen maka *Return On Asset* yang dihasilkan semakin besar. Sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Amalia (2015), bahwa Komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja keuangan.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat digambarkan paradigma dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018:221) berpendapat bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Maka dari itu, berdasarkan teori dan kerangka pikiran yang telah peneliti dikemukakan sebelumnya maka hipotesis yang terdapat penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (ROA).

H_2 : Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (ROA).